



POLISI TETAPKAN 13 TERSANGKA

Pemda Fokus Pemulihan dan Pendataan Ulang

YOGYA (KR) - Pemda DIY menegaskan pentingnya asesmen menyeluruh dalam menangani anak-anak korban dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha Kota Yogyakarta. Langkah ini diambil menyusul penggerebekan oleh aparat kepolisian setelah adanya laporan dugaan praktik pengasuhan yang tidak manusiawi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3APP) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, menjelaskan, setiap anak yang pernah diasuh di daycare tersebut memiliki latar belakang dan durasi penitipan yang berbeda. Hal ini membuat

dampak yang dialami masing-masing anak juga beragam. Oleh karena itu, asesmen tidak bisa dilakukan secara seragam, melainkan harus menyeluruh dan individual.

Asesmen yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi psikologis hingga kesehatan fisik dan tumbuh kembang anak. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan apakah terdapat trauma, gangguan kesehatan atau hambatan perkembangan akibat perlakuan yang diterima. Selain itu, Pemda DIY juga memberikan perhatian pada kondisi orangtua korban yang berpotensi mengalami tekanan psikologis setelah

mengetahui kejadian tersebut.

Untuk mendukung pemulihan, pemerintah menyediakan layanan pendampingan gratis melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di tingkat kota maupun provinsi. Mengingat sebagian orangtua korban berasal dari wilayah Sleman dan Bantul, koordinasi juga dilakukan dengan UPT PPA di kabupaten tersebut. Penanganan trauma akan melibatkan pusat pembelajaran keluarga, sementara aspek kesehatan ditangani bersama Dinas Kesehatan dan rumah sakit yang ditunjuk.

*** Bersambung hal 9 kol 1**

Seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, mengungkapkan, penggerebekan dilakukan sebagai tindak lanjut laporan mantan karyawan daycare. Pelapor mengaku menyaksikan langsung dugaan perlakuan tidak layak terhadap bayi dan anak, termasuk indikasi penganiayaan dan penelantaran, sebelum akhirnya memutuskan mengundurkan diri dan melapor ke pihak berwajib.

Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 103 anak pernah dititipkan di daycare tersebut, dengan 53 anak di antaranya telah terverifikasi mengalami kekerasan fisik maupun verbal. Angka ini menunjukkan, kasus tersebut memiliki dampak yang luas dan serius.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan SIK CPHR menegaskan, jajaran kepolisian masih terus bergerak melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap mereka yang diamankan di lokasi saat penggerebekan.

"Dari 13 tersangka itu ada kepala

sekolah dan kepala yayasan, termasuk pihak-pihak yang berada di lokasi pada saat itu. Saat ini proses pemeriksaan maraton masih berlangsung dan jumlah tersangka ini bisa berkembang lagi, tergantung pada hasil pengembangan serta keterangan tambahan dari mereka yang saat ini sudah diamankan," paparnya.

Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo di sela-sela pelepasan Jalan Sehat PWI DIY, kemarin menegaskan, Pemkot Yogyakarta bergerak cepat menanggapi kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha. Ia menyebut pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia menjelaskan, Pemkot sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan KPAI serta akan menemui keluarga korban untuk memberikan pendampingan langsung. Bahkan, ia menyebut sudah ada keluarga korban yang siap bertemu pada hari yang sama dan pemerintah akan bersikap proaktif hingga mendatangi rumah warga bila diperlukan.

Selain itu, Hasto juga menegaskan langkah tegas berupa sweeping seluruh tempat penitipan anak (daycare) di Kota Yogyakarta. Daycare yang tidak memiliki izin resmi akan ditertibkan dan bisa ditutup. Hal ini dilakukan karena kasus Little Aresha diketahui tidak memiliki izin operasional sebagai TPA, PAUD, maupun TK.

Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan sosialisasi terkait standar daycare yang layak. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kelayakan sarana dan prasarana, penerapan prosedur operasional yang jelas serta kualifikasi sumberdaya manusia. Detail teknis seperti keamanan ruangan, kondisi perabot, hingga lingkungan sekitar juga menjadi perhatian.

Upaya penanganan kasus ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), DP3AP2KB Kota Yogyakarta serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) daerah.

(Ria/Obi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005